

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adhari, Ade, 2020, *Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana*, Depublish, Sleman.
- Ali, Mahrus, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Dewata, Mukti Fajar Nur & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2005, *Pemberantasan Korupsi: Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi dan Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Demi Keadilan, Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Kemang, Jakarta.
- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, 2017, *Kompilasi Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Tahun 1983-2017*, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Muhammad, Rusli, 2019, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Dilengkapi Dengan 5 Undang-Undang Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta.

- Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoretis Dan Praktik*, Alumni, Bandung.
- Nelson, Febby Mutiara, 2020, *Plea Bargaining & Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2020, *Sistem Peradilan Pidana Dan Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Priyono, B. Herry, 2018, *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rafi, Muhammad, 2015, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta.
- Ravena, Dey & Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal [Criminal policy]*, Kencana, Jakarta.
- Schafmeister, D, Nico Keijzer & Sutorius, 1995, *Hukum Pidana: Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono, Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Suratman & Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Suteki & Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Rajawali Press, Jakarta.
- Syamsuddin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam dan Huma, Jakarta.

B. Jurnal dan Tesis

Ifrani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa", *Jurnal Al`Adl*, Vol.9, No.3, Desember 2017.

Hasudungan, Benget, 2017, "Optimalisasi Eksekusi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Tesis*, Pascasarjana Magister Hukum Litigasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Hiariej, Eddy O.S., "Memahami Tindak Pidana Korupsi", *Kompas*, 25 Mei 2015.

_____, "'Lex Specialis" dalam Hukum Pidana", *Kompas*, 12 Juni 2018.

_____, "Penegakan Hukum Kejahatan Luar Biasa", *Kompas*, 28 Desember 2018

_____, "Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi", Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

_____, "*United Nations Convention Against Corruption* Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Mimbar Hukum*, Vol.31, No.1, Februari 2019.

_____, "Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak (*Principle of Lex Specialist Systematic and Tax Criminal Law*)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.21, No.1, Maret 2021.

Hikmawati, Puteri, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?", *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol.10, No. 1, September 2019.

Madusira, Muhammad Aras, 2011, "Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Tesis*, Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Mahmud, Ade "Dinamika Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 3, No.2, Desember 2017.

Munzil, Fontian dkk, "Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum", *Ius Quia Iustum*, Vol. 22, No.1, Januari 2015.

Natalina, Mia, 2021, "Eksekusi Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi", *Tesis*, Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Salmi, Akhiar, "Pidana Pembayaran Uang Pengganti: Dulu Kini Dan Masa Datang", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2009.

Sidabutar, Lambok Marisi Jakobus, "Hukum Kepailitan dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi sebagai Pembayaran Uang Pengganti", *INTEGRITAS*, Vol.5, No.2, Desember 2019.

Sinaga, Christine Juliana, "Kajian Terhadap Pidana Penjara Sebagai Subsidaire Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.1, No. 2, September 2017.

Sonata, Liber, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, No.1, November 2015.

Suarbawa, I Ketut, dkk, "Optimalisasi Proses Pengembalian Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Poso)", *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. VII, No.1, Januari-Juni 2019.

Suyatmiko, Wawan Heru. "Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020", *INTEGRITAS*, Vol.7, No. 1, Juni 2021.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2011).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2958).

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Surat Direktur Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan RI Nomor B-623/F/Fu.1/4/2008 Perihal Upaya Pengembalian Pengganti Uang.

Surat Direktur Upaya Hukum, Eksekusi, dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan RI Nomor B-625/F/Fu.1/4/2008 perihal Penyelesaian Eksekusi Uang Pengganti.

Surat Jaksa Agung Republik Indonesia perihal Tata Cara Penyelesaian Denda dan Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor B-020/A/JA/04/2009 perihal Tata Cara Penyelesaian Denda & Uang Pengganti Dalam Perkara Tipikor.

Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B- 1525/F/Fu/07/2009 perihal Penyelesaian Uang Pengganti Dan Denda Tindak Pidana Korupsi Maupun Denda Tindak Pidana Ekonomi Dan Tindak Pidana Khusus Lainnya.

Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-1855/F/Fu.1/08/2013 perihal Optimalisasi Eksekusi Uang Pengganti Dalam Perkara TP Korupsi.

Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-185/F/Fu.1/01/2014 Perihal Petunjuk Teknis Tata Cara Penyelesaian Uang Pengganti.

Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-1535/F/Fu.1/05/2014 Perihal Administrasi Pencarian & Penyitaan Harta Benda Milik Terpidana Utk Menutupi Uang Pengganti (P-48A, Pidsus-38A).

Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-2099/F/Fu/12/2021 Perihal Petunjuk Penyelesaian Eksekusi Tunggalan Uang Pengganti

D. Internet

- “Hasil Pencarian Kata Korupsi” - KBBI Daring”,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>, diakses 6 Agustus 2021.
- “Hasil Pencarian Kata Mengorupsi” - KBBI Daring”,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mengorupsi>, diakses 6 Agustus 2021.
- Indonesia Corruption Watch, “Kinerja Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2020”,
<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/210101Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%202020.pdf>, diakses 4 Agustus 2021.
- Indonesia Corruption Watch dan Transparency International Indonesia, “Penguatan Semu Pemberantasan Korupsi; Pemantauan Kinerja Satu Tahun KPK Periode 2019-2023”,
<https://ti.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Pemantauan-Kinerja-Tahun-I-KPK-2020-TIIxICW-1.pdf>, diakses pada 5 Agustus 2021.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, “Laporan Tahunan KPK 2016”,
<https://www.kpk.go.id/images/Laporan%20Tahunan%20KPK%202016%20Bahasa%20Indonesia.pdf>, diakses 5 Agustus 2021.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, “Laporan Tahunan KPK 2017”,
<https://www.kpk.go.id/images/Laporan-Tahunan-KPK-2017-Web.pdf>, diakses pada 5 Agustus 2021.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, “Laporan Tahunan KPK 2018”,
<https://www.kpk.go.id/images/Integrito/LaporanTahunanKPK/LaporanTahunan-KPK-2018-.pdf>, diakses 5 Agustus 2021.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, “Laporan Tahunan KPK 2019”,
<https://www.kpk.go.id/images/pdf/Laporan-Tahunan-KPK-2019-Bahasa.pdf>, diakses pada 5 Agustus 2021.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, “Laporan Tahunan KPK 2020”.
https://www.kpk.go.id/images/pdf/Laporan_Tahunan_KPK_2020.pdf, diakses 5 Agustus 2021.
- M.Rosseno Aji, “Setya Novanto Telah Cicil Uang Pengganti Sebesar Rp.7,6 Miliar”,
<https://nasional.tempo.co/read/1128088/setya-novanto-telah-cicil-uang-pengganti-sebesar-rp-76-miliar/full&view=ok> diakses pada 20 Februari 2021.
- Muhammad Iqbal, “Kejagung Eksekusi Uang Pengganti Perkara Korupsi IM2 Rp.1,3T”,
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20211202173619-4->

296235/kejugung-eksekusi-uang-pengganti-perkara-korupsi-im2-rp-13-t diakses 10 Februari 2022.

Pengadilan Negeri Ambon, http://sipp.pn-ambon.go.id/index.php/detil_perkara, diakses 12 Februari 2022

Sandro Gatra, “Koruptor Samadikun Hartono Bayar Rp 87 Miliar ke Negara, Penampakan Tumpukan Duitnya”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/18/10381051/koruptor-samadikun-hartono-bayar-rp-87-miliar-ke-negara-begini-penampakan?page=all#:~:text=Pengadilan%20memvonis%20Samadikun%20dengan%20hukuman,sebesar%20Rp%20169%2C4%20miliar>, diakses 20 Februari 2022

Tri Subarkah, “KPK Setor Rp 10 Miliar Lebih ke Kas Negara”, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/419178/kpk-setor-rp10-miliar-lebih-ke-kas-negara>, diakses pada 20 Februari 2022.

Zunita Putri, “Uang Pengganti Angie: Dikorting Rp 29 M, Kurang Bayar Rp.4,5 M Diganti Bui”, <https://news.detik.com/berita/d-5968063/uang-pengganti-angie-dikorting-rp-29-m-kurang-bayar-rp-45-m-diganti-bui>